



## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah Dimoderasi Komitmen Organisasi

Dian Rizky Putri. S<sup>1</sup>, Nur Azlina<sup>2</sup> dan Al Azhar A<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Riau, email: utisiahaan26@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Riau, email: nur.azlina@lecturer.unri.ac.id

<sup>3</sup>Universitas Riau, email: alazhara@lecturer.unri.ac.id

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris terkait dengan pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan tata kelola pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah, serta pengaruh moderasi komitmen organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Populasi dari penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bengkalis. Sampel penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang menggunakan beberapa kriteria untuk menentukan sampel yang akan digunakan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan bantuan alat uji statistik SPSS 25, sedangkan data yang digunakan merupakan kuesioner yang telah diisi oleh masing-masing OPD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, 2) kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, 3) tata kelola pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, 4) tidak terdapat pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah melalui komitmen organisasi, 5) tidak terdapat pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah melalui komitmen organisasi, 6) terdapat pengaruh tata kelola pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah melalui komitmen organisasi.*

**Kata kunci:** Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Tata Kelola Pemerintah, Kinerja Pemerintah Daerah, Komitmen Organisasi

### Abstract

*This study aims to find empirical evidence related to the effect of budgetary participation, clarity of budget goals, and government governance on local government performance, as well as the moderating effect of organizational commitment on local government performance. The population of this study is the Regional Apparatus Organization in Bengkalis Regency. The sample of this study was selected using purposive sampling technique, namely a sampling technique that uses several criteria to determine the sample to be used. Hypothesis testing was carried out with the help of the SPSS 25 statistical test tool, while the data used were questionnaires that had been filled out by each OPD. The results of this study indicate that 1) budgetary participation affects the performance of local governments, 2) clarity of budget targets affects the performance of local governments, 3) government governance does not affect the performance of local governments, 4) there is no effect of budgetary participation on government performance regions through organizational commitment, 5) there is no effect of clear budget targets on local government performance through organizational commitment, 6)*

*there is an influence of government governance on local government performance through organizational commitment.*

**Keywords:** *Participation in Budgeting, Clarity of Budget Goals, Government Governance, Local Government Performance, Organizational Commitment*

---

## 1. Pendahuluan

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh individu maupun kelompok. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan bahwa kinerjanya sangat bagus, begitupun sebaliknya apabila pencapaian yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan maka dapat dikatakan bahwa kinerjanya buruk. Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019<sup>[1]</sup>, kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kinerja pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dengan baik.

Ada beberapa faktor yang dapat menilai apakah kinerja pemerintah daerah tersebut sudah maksimal atau belum. Faktor pertama adalah partisipasi penyusunan anggaran. Menurut Lutfiandri (2021)<sup>[2]</sup>, partisipasi penyusunan anggaran adalah proses pengambilan keputusan bersama antara dua pihak atau lebih yang membawa pengaruh di kemudian hari bagi mereka yang ikut dalam memberikan keputusan. Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah adalah kejelasan sasaran anggaran. Menurut Ginting (2010)<sup>[3]</sup>, kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Faktor ketiga yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah adalah tata kelola pemerintah. Jayanti *et al.* (2015)<sup>[4]</sup> mengartikan tata kelola sebagai suatu proses pengelolaan berbagai bidang kehidupan (sosial, politik, ekonomi) di suatu negara atau daerah dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam penggunaan segala sumber daya, baik alam, manusia, dan keuangan dengan cara yang sesuai dengan prinsip keadilan, efisiensi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas publik, dan hak-hak asasi manusia.

Selain tiga faktor tersebut, ada satu hal yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan faktor-faktor yang ada dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah yaitu komitmen organisasi. Komitmen organisasi dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana aparat pemerintah daerah memihak suatu organisasi tertentu serta untuk mempertahankan keanggotaannya dalam suatu organisasi. Apabila suatu organisasi memiliki komitmen organisasi yang kuat maka akan mempengaruhi aparat pemerintah daerah untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Teori Penetapan Tujuan (*Goal-Setting Theory*)

Teori ini dikemukakan oleh Locke (1968)<sup>[5]</sup> yang mengatakan adanya hubungan yang tidak terpisahkan antara penetapan tujuan dan kinerja. *Goal-setting theory* menekankan pada pentingnya hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan kinerja yang dihasilkan. Konsep dasar teori ini adalah apabila seseorang yang mampu memahami tujuan yang diharapkan organisasi maka pemahaman tersebut akan mempengaruhi perilaku kerjanya. Jika seorang individu berkomitmen untuk mencapai tujuan mereka, itu akan mempengaruhi tindakan mereka dan mempengaruhi konsekuensi dari kinerja mereka. Teori ini juga menjelaskan bahwa penetapan tujuan yang sulit dan hasilnya yang dapat diukur akan mampu meningkatkan prestasi kerja (kinerja) yang diikuti dengan kemampuan kerja.

## 2.2 Teori Pengelolaan (*Stewardship Theory*)

Donaldson & Davis (1991)<sup>[6]</sup> menyatakan bahwa *stewardship theory* merupakan sebuah pengembangan dari kondisi manajer yang termotivasi atas sebuah target yang berasal dari hasil sasaran utama untuk kepentingan organisasi bukan termotivasi pada kepentingan pribadinya. Konsep pengelolaan tidak dibebani kewajiban untuk melaporkan dan mengacu pada pengelolaan atas aktivitas secara ekonomis dan efisien, sedangkan *accountability* mewajibkan pada pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggung jawab. Implikasi teori pengelolaan terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

## 2.3 Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja pemerintah daerah selalu menjadi sorotan publik karena menjadi gambaran dari pemerintah yang baik mengenai tingkat pencapaian kegiatan/sasaran/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Menurut Moeheriono (2012)<sup>[7]</sup> kinerja berasal dari kata *performance* dan disebut juga *actual performance* atau prestasi yang telah dicapai oleh seseorang. Menurut Mangkunegara (2013)<sup>[8]</sup>, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah adalah suatu prestasi/pencapaian yang dihasilkan suatu pemerintah daerah. Kinerja instansi pemerintah dapat mencakup efektifitas dan efisiensi untuk mencapai kualitas kegiatan serta kebijakan suatu program yang dievaluasi oleh pemerintah.

## 2.4 Partisipasi Penyusunan Anggaran

Menurut Mulyadi (2018)<sup>[9]</sup>, partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pihak yang membuat keputusan tersebut. Partisipasi dalam anggaran berarti bahwa manajer operasi dan komite anggaran bersama-sama memutuskan serangkaian kegiatan di masa depan yang akan dilakukan oleh manajer operasi untuk mencapai tujuan anggaran. Menurut Sari (2018)<sup>[10]</sup> mengatakan partisipasi penganggaran adalah suatu proses keputusan yang menggunakan pendekatan *bottom up*, yang dimulai dari usulan bawahan pada atasannya atau pimpinan perusahaan. Adanya partisipasi anggaran membuat bawahan memiliki kesempatan untuk memberitahukan informasi yang mereka ketahui pada atasan, sehingga atasannya dapat membuat terbaik untuk organisasinya. Anggaran digunakan sebagai suatu standar untuk mengukur kinerja seseorang.

## 2.5 Kejelasan Sasaran Anggaran

Dalam organisasi pemerintah, kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Ginting (2010)<sup>[3]</sup>, kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung-jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja.

## 2.6 Tata Kelola Pemerintah

*Governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *private sectors* (sektor swasta/dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Untuk menghasilkan pemerintahan yang baik dan bersih perlu diterapkan konsep tata kelola yang baik. *Good Governance* sektor publik juga dapat diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan stakeholders terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Sedarmayanti (2012)<sup>[11]</sup> menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan adalah suatu peningkatan kualitas yang baik serta signifikan dalam melakukan pelayanan publik. Hal ini dapat menjalankan fungsi kerja dan akuntabilitas pemerintahan khususnya dalam mencapai tujuan kinerja instansi pemerintah yang efektif dan efisien.

## 2.7 Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi memegang peranan penting, terutama untuk kinerja seseorang di tempat kerja, hal ini telah menjadi rujukan dan motivasi seseorang untuk membuat mereka lebih bertanggung jawab atas kewajibannya. Menurut Wirawan (2013)<sup>[12]</sup>, mendefinisikan komitmen organisasi adalah perasaan keterkaitan atau keterikatan psikologis dan fisik pegawai terhadap organisasi tempai ia bekerja atau organisasi dimana ia menjadi anggotanya. Sedangkan menurut Griffin dalam buku Umam (2010)<sup>[13]</sup>, mendefinisikan komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengenal dan terikat pada organisasinya. Seseorang yang memiliki komitmen yang tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi. Komitmen organisasi dapat tumbuh dikarenakan seseorang memiliki keterikatan emosional pada perusahaan, termasuk dukungan moral dan menerima nilai yang ada dalam perusahaan.

## 2.8 Hipotesis

H1 : Partisipasi Penyusunan Anggaran Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

H2 : Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

H3 : Tata Kelola Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

H4 : Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

H5 : Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

H6 : Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban dari responden yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara *purposive sampling*. Sampel pada penelitian ini adalah 35 OPD yang berada di Kabupaten Bengkalis. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi, uji determinasi, dan uji interaksi atau *moderated regression analysis*.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 4.1 Uji Statistik Deskripsif

Tabel 1 : Hasil Pengujian Statistik

Descriptive Statistics
------------------------

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Partisipasi Penyusunan Anggaran	105	30,00	40,00	34,4190	2,14736
Kejelasan Sasaran Anggaran	105	21,00	30,00	25,5905	1,87440
Tata Kelola Pemerintah	105	41,00	53,00	47,7904	2,63006
Kinerja Pemerintah Daerah	105	33,00	45,00	38,3429	2,52232
Komitmen Organisasi	105	27,00	41,00	34,7333	3,72689
Valid N (listwise)	105				

Sumber : Data Olahan SPSS, 2021

Dari tabel 1 menunjukkan bahwa sebaran data cukup baik karena nilai standar deviasinya tiap variabel lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*). Hal tersebut disebabkan bahwa standar deviasi merupakan pencerminan penyimpangan yang sangat besar, sehingga penyebaran data menampilkan hasil yang normal.

#### 4.2 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data penelitian ini terdiri dari uji validitas data dan uji realibilitas. Setelah dilakukan pengujian, hasilnya menunjukkan bahwa data penelitian sudah valid dan reliabel. Dibuktikan dengan nilai *pearson correlation* > 0,191 pada pengujian validitas data dan nilai variabel partisipasi penyusunan anggaran yaitu 0.658, kejelasan sasaran anggaran yaitu 0.661, tata kelola pemerintah yaitu 0.603, kinerja pemerintah daerah yaitu 0.711, dan komitmen organisasi yaitu 0.875 pada pengujian realibilitas.

#### 4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji yang digunakan terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, dan heterokedastisitas. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa data dapat diterima, bebas multikolinearitas, dan terbebas dari heterokedastisitas. Hal dibuktikan dengan nilai *signifikansi unstandardized Residual atau Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200. Nilai VIP variabel partisipasi penyusunan anggaran senilai 1.006, kejelasan sasaran anggaran senilai 1.074, dan tata kelola pemerintah senilai 1.068 dan nilai Tolerance variabel partisipasi penyusunan anggaran senilai 0.994, kejelasan sasaran anggaran senilai 0.931, dan tata kelola pemerintah senilai 0.937. Dan terakhir dibuktikan dengan tampilan scatterplot dari variabel dependen yaitu Kinerja Pemerintah Daerah menunjukkan titik-titik menyebar diatas dan dibawah pada sumbu Y.

#### 4.4 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Alat analisis data yang digunakan dengan menggunakan alat bantu yaitu Software SPSS Versi 25. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan alat analisis statistik yakni analisis regresi linear berganda. Uji analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengukur besarnya pengaruh hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2 : Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.671	2.953		.904	.368

Partisipasi Penyusunan Anggaran	.117	.054	.097	2.163	.033
Kejelasan Sasaran Anggaran	1.212	.064	.876	18.868	.000
Tata Kelola Pemerintah	.014	.046	.014	.300	.765
a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah					

Sumber : Data Olahan SPSS, 2021

Dari tabel 2 dapat dilihat hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS, didapatkan model persamaan regresi akhir sebagai berikut :

$$Y = 2.671 + 0.117X_1 + 1.212X_2 + 0.014X_3 + e$$

#### 4.5 Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan maka diperoleh hasil sebagai berikut ini :

**Tabel 3 : Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.893 <sup>a</sup>	.797	.791	1.18510

a. Predictors: (Constant), Tata Kelola Pemerintah, Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Penyusunan Anggaran  
b. Dependent Variable : Kinerja Pemerintah Daerah

Sumber : Data Olahan SPSS, 2021

Berdasarkan tabel 3 diatas, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Tata Kelola Pemerintah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan nilai Adjusted R square sebesar 0.797 atau 79,7%, sedangkan 0,203 atau 20,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dapat diamati dalam penelitian ini.

#### 4.6 Uji Interaksi atau *Moderated Regression Analysis*

**Tabel 4 : Hasil Uji Regresi Moderasi**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model 1	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-12.201	48.443		-.252	.802
Partisipasi Penyusunan Anggaran	1.530	1.415	1.267	1.081	.282
Komitmen Organisasi	1.221	1.357	1.755	.900	.370
Partisipasi Penyusunan Anggaran*Komitmen Organisasi	-.037	.040	-2.211	-.938	.350
Model 2	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	-6.491	14.902		-.436	.664
Kejelasan Sasaran Anggaran	1.692	.580	1.224	2.918	.004
Komitmen Organisasi	.378	.425	.544	.889	.376
Kejelasan Sasaran Anggaran*Komitmen Organisasi	-.013	.017	-.542	-.785	.434
Model 3	B	Std. Error	Beta	t	Sig.

(Constant)	107.543	36.722		2.929	.004
Tata Kelola Pemerintah	-1.430	.769	-1.451	-1.860	.066
Komitmen Organisasi	-2.303	1.047	-3.311	-2.200	.030
Tata Kelola Pemerintah*Komitmen Organisasi	.048	.022	3.581	2.175	.032
a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah					

**Sumber :** Data Olahan SPSS, 2021

Berdasarkan tabel 4 diatas, dapat dilihat koefisien regresi variabel moderasi pada variabel partisipasi penyusunan anggaran sebesar (-0.037), kejelasan sasaran anggaran sebesar (-0.013), dan tata kelola pemerintah sebesar (0.048). Sedangkan nilai signifikan variabel moderasi pada variabel partisipasi penyusunan anggaran sebesar (0.350), kejelasan sasaran anggaran sebesar (0.434), dan tata kelola pemerintah sebesar (0.032). Sehingga dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi tidak memoderasi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah, akan tetapi komitmen organisasi memoderasi pengaruh tata kelola pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah.

#### 4.7 Pembahasan

##### **Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil uji regresi, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,117 dan nilai t hitung  $2.163 > t$  tabel 1.983731 serta probabilitas sebesar 0,033 ( $p < 0,050$ ) yang berarti ada pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran (X1) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi pegawai yang tinggi dalam penyusunan anggaran akan dapat meningkatkan kinerja, hal ini dikarenakan partisipasi pegawai akan melahirkan komunikasi dan interaksi yang baik antara sesama pegawai dalam organisasi dan akan menciptakan kesadaran pegawai untuk bersungguh-sungguh dalam mencapai tujuan dan target yang telah dibuat dalam organisasi. Mongeri (2013)<sup>[14]</sup>. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Siahaan et al. (2017)<sup>[15]</sup>, Saputra (2019)<sup>[16]</sup> dan Siregar (2020)<sup>[17]</sup> yang menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

##### **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil uji regresi, diperoleh nilai koefisien sebesar 1,212 dan nilai t hitung  $18.868 > t$  tabel 1.983731 serta probabilitas sebesar 0,000 ( $p < 0,050$ ) yang berarti terdapat pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y). Kejelasan sasaran anggaran menyebabkan aparat pemerintah daerah semakin mengerti target-target yang akan dicapai dimasa datang sehingga dapat meningkatkan kinerja. Sasaran anggaran daerah harus bisa menjadi tolok ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan penganggaran daerah dapat menggambarkan sasaran kinerja yang jelas (Emilia *et al.*, 2013)<sup>[18]</sup>. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Risdiana (2018)<sup>[19]</sup>, Wanudya (2019)<sup>[20]</sup> dan Saputra (2019)<sup>[16]</sup> bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

##### **Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Terhadap Kinerja Permerintah**

Berdasarkan hasil uji regresi, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,014 dan nilai t hitung  $0,300 < t$  tabel 1.983731 serta probabilitas sebesar 0,765 ( $p > 0,050$ ) yang berarti terdapat pengaruh tata kelola pemerintah (X3) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y). Hal ini dikarenakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah tersebut belum dilaksanakan secara optimal. Saat pemda menerapkan prinsip akuntabilitas pada lingkungannya, ini tidak serta merta akan menumbuhkan kepercayaan tinggi pada masyarakat. Pemenuhan janji dan perumusan kebijakan yang memihak rakyat merupakan sesuatu yang penting karena ini merupakan perwujudan

akuntabilitas suatu pemda, dimana makna dari akuntabilitas adalah pertanggungjawaban. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hutapea & Widyaningsih (2017)<sup>[21]</sup> dan Vegy & Serly (2019)<sup>[22]</sup> bahwa tata kelola pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

#### **Peran Komitmen Organisasi dalam Memoderasi Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil uji regresi, diperoleh nilai koefisien sebesar -0,037 dan nilai t hitung -0,938 < t tabel 1.983731 serta probabilitas sebesar 0,350 ( $p > 0,050$ ) yang berarti tidak terdapat pengaruh partisipasi penyusunan anggaran (X1) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y) melalui komitmen organisasi (Z). Temuan ini juga tidak sejalan dengan *goal setting theory* (teori penetapan tujuan) yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam teori ini diasumsikan bahwa individu telah menentukan tujuan atas perilakunya di masa depan, dan tujuan tersebut akan mempengaruhi perilaku yang sesungguhnya. Sederhananya dikatakan bahwa pimpinan memiliki tingkat komitmen yang tinggi tetapi karena adanya tekanan dari atasan serta persaingan dari rekan kerja sehingga pemimpin sulit mengekspresikan rasa kecintaannya terhadap organisasi. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Yogantara & Wirakusuma (2013)<sup>[23]</sup> dan Djaelani & Subhan (2019)<sup>[24]</sup>, yang membuktikan bahwa komitmen organisasi tidak memoderasi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial.

#### **Peran Komitmen Organisasi dalam Memoderasi Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil uji regresi, diperoleh nilai koefisien sebesar -0,013 dan nilai t hitung -0,785 < t tabel 1.983731 serta probabilitas sebesar 0,434 ( $p > 0,050$ ) yang berarti tidak terdapat pengaruh kejelasan sasaran anggaran (X2) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y) melalui komitmen organisasi (Z). Hal ini disebabkan sasaran anggaran yang masih ambigu, baik sasaran, jumlah anggaran, dan waktu pelaksanaan yang sering terjadi pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang masih menimbulkan konflik dengan masyarakat. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan di awal masih mengambang, sehingga kurang adanya koordinasi antara instansi yang terkait atau antara departemen yang ada. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Bereki (2018)<sup>[25]</sup>, yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak memoderasi pengaruh antara kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah.

#### **Peran Komitmen Organisasi dalam Memoderasi Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil uji regresi, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,048 dan nilai t hitung 2.175 > t tabel 1.983731 serta probabilitas sebesar 0,032 ( $p < 0,050$ ) yang berarti terdapat pengaruh tata kelola pemerintah (X3) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y) melalui komitmen organisasi (Z). Dengan memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menjadikan pegawai atau aparat pemerintah lebih mendahulukan kepentingan pemerintah terlebih dahulu daripada kepentingannya sendiri sehingga ia dapat menjadikan pemerintah atau organisasinya menjadi lebih baik. Maka dari itu, aparat yang memiliki komitmen organisasi dapat terdorong dalam melaksanakan tata kelola pemerintah di pemerintah daerahnya sehingga menghasilkan kinerja pemerintah daerah yang baik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurhazizal *et al.* (2019)<sup>[26]</sup> dan Usman & Paranoan (2013)<sup>[27]</sup>, yang menyatakan bahwa komitmen organisasi memoderasi pengaruh antara tata kelola pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah.

## **5. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa : (1) Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. (2) Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. (3) Tata

Kelolah Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. (4) Komitmen Organisasi tidak memoderasi pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. (5) Komitmen Organisasi tidak memoderasi pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. (6) Komitmen Organisasi memoderasi pengaruh Tata Kelola Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

#### Daftar Pustaka

- [1] Perpu, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Indonesia, 2019.
- [2] M. Lutfiandri, "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Pengawasan Fungsional, Komitmen Organisasi, dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan)," *JOM FEB Univ. Riau*, 2021.
- [3] Ginting, *Reformasi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Semarang: Salemba Empat, 2010.
- [4] Y. Jayanti, R. Rusli, and Y. Yusraini, "Pengaruh Good Governance, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Kota Dumai)," *J. Online Mhs. Fak. Ekon. Univ. Riau*, vol. 2, no. 2, p. 33942, 2015.
- [5] E. A. Locke, "Toward a Theory of Task Motivation and Incentives," *Organ. Behav. Hum. Perform.*, vol. 3, no. 2, pp. 157–189, 1968.
- [6] L. Donaldson and J. H. Davis, "Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns," *Aust. J. Manag.*, vol. 16, no. 1, pp. 49–64, 1991, doi: 10.1177/031289629101600103.
- [7] Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- [8] A. A. A. P. Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- [9] Mulyadi, *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: In Media, 2018.
- [10] R. C. Sari, *Akuntansi Keperilakuan: Teori dan Implikasi*. Yogyakarta: ANDI, 2018.
- [11] S. Sedarmayanti, *Good Governance "Kepemerintahan yang Baik."* Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- [12] Wirawan, *Kepemimpinan. Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- [13] K. Umam, *Perilaku Organisasi*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- [14] M. Mongeri, "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Padang)," *J. Akunt.*, vol. 369, no. 1, pp. 1689–1699, 2013.
- [15] C. Siahaan, E. Savitri, and A. A., "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Dengan Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang)," *J. Online Mhs. Fak. Ekon. Univ. Riau*, vol. 4, no. 1, pp. 1351–1373, 2017.
- [16] Y. E. Saputra, "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Tegal)," *Univ. Pancasakti Tegal*, 2019.
- [17] L. Siregar, "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Dairi)," Universitas Riau, 2020.
- [18] R. N. Emilia, W. Abdillah, and Abdullah, "Pengaruh Partisipasi dalam Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Serta Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah

- Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Bengkulu),” *J. Fairness*, vol. 3, no. 3, pp. 42–53, 2013.
- [19] P. Risdiana, “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo (Studi Empiris pada Dinas dan Badan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo),” *Jur. Akunt. Fak. Ekon. dan Bisnis Univ. Muhammadiyah Surakarta*, vol. 2, pp. 227–249, 2018.
- [20] A. Wanudya, “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Struktur Desentralisasi, Evaluasi Anggaran Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah,” *UMMagelang Conf. Ser.*, 2019.
- [21] F. L. Hutapea and A. Widyaningsih, “Pengaruh Good Government Governance Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia),” *J. ASET (Akuntansi Riset)*, vol. 9, no. 1, pp. 173–186, 2017.
- [22] G. Vegy and V. Serly, “Pengaruh Good Government Governance dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang Terdapat pada Indonesia Government Indexs tahun 2014),” *J. Eksplor. Akunt.*, vol. 1.
- [23] K. K. Yogantara and M. G. Wirakusuma, “Pengaruh Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan pada Hubungan Antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada BPR di Bali),” *e-Journal Ekon. dan Bisnis Univ. Udayana*, vol. 02, no. 08, 2013.
- [24] Y. Djaelani and Subhan, “Moderasi Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran dengan Kinerja Manajerial di Kabupaten Halmahera Barat,” *J. Akun Nabelo J. Akunt. Netral, Akuntabel, Objekt.*, vol. 1, no. 2, 2019.
- [25] I. Bereki, “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dengan Tiga Variabel Moderating,” *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yogyakarta*, 2018.
- [26] M. Nurhazizal, Y. M. Basri, and A. Nasir, “Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan Dan Kompetensi Sdm Terhadap Kinerja Pemerintah Desa: Good Governance Sebagai Pemediasi,” *J. Akunt.*, vol. 8, no. 1, pp. 80–92, 2019.
- [27] E. Usman and S. Paranoan, “Anggaran Partisipatif dalam menunjang kinerja Aparatur Pemerintah Daerah,” *J. Account.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–164, 2013.